

## **RINGKASAN**

**Prosedur Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Pada Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Jember**, Vivant Juniar Yasinov, NIM D42222010 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Audi Ryan Setiawan S.STP,MM. (Pembimbing Lapangan) dan Avisenna Harkat, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Lapangan)

Laporan magang ini dibuat untuk menjelaskan terkait hasil dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan. Adapun tujuan khusus laporan magang adalah untuk meningkatkan kompetensi melalui penerapan ilmu akuntansi sektor publik secara langsung di lingkungan pemerintahan, serta memberikan pemahaman praktis mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, yang fokus utamanya pada prosedur verifikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan 2026, yang merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selama magang bertugas membantu pada bidang anggaran, tugas yang dilaksanakan meliputi verifikasi dokumen RKA, scan dokumen SP2D, meminta stempel asisten, menyampaikan surat ke inspektorat, membuat surat pengantar, membuat lampiran, membuat nomor surat, memeriksa hasil lampiran reuiu RKA OPD Irban.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berfungsi sebagai unit kerja yang mengelola dan mengendalikan proses perencanaan anggaran daerah. Tugas utamanya meliputi mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen anggaran agar sesuai dengan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyiapkan

dokumen penjabaran APBD dan perubahannya. Selain itu, Bidang Anggaran juga memberikan asistensi teknis kepada OPD, berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel